Bupati Pasuruan Serahkan LKPD Unaudited 2025 ke BPK Jatim

Selasa, 31 Maret 2026

Bupati Pasuruan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun anggaran 2025 kepada BPK Provinsi Jawa Timur pada Senin sore. Penyerahan ini merupakan langkah awal proses pemeriksaan keuangan oleh BPK.

Acara ini juga dihadiri Gubernur Jawa Timur serta kepala daerah se-Provinsi Jawa Timur. Penyerahan LKPD unaudited ini bertujuan untuk menghasilkan opini BPK mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Gubernur Khofifah mengapresiasi peran BPK dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi, arahan, dan pendampingan konstruktif dari BPK.

Penyerahan LKPD ini menjadi momentum untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Gubernur menekankan komitmen perbaikan dalam pengelolaan kas, pertanggungjawaban hibah, dan data aset daerah.

Gubernur mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan ketelitian pencatatan laporan keuangan. Ia berharap perbaikan berkelanjutan ini dapat membawa seluruh daerah menuju tata kelola keuangan yang lebih baik dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.